BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

4.1.1 Sejarah BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, yang menyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi, maka BPK RI melakukan pembukaan Perwakilan di Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Bandung. Dengan semakin meningkatnya luas lingkup pemeriksaan, pembukaan perwakilan dimaksud untuk

meningkatkan mutu hasil pemeriksaan, serta untuk memperkuat peran dan kinerja BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di Indonesia.

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat didirikan pada 27 Januari 2006. Pembukaan dilakukan oleh Ketua BPK Anwar Nasution. Peresmian dilakukan di gedung eks KASIPA II Bandung di Jalan Surapati 12 Bandung. Status gedung adalah pinjam pakai.

Pendirian BPK RI di Bandung adalah unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. Perwakilan BPK RI di Bandung didirikan pada tanggal 2 Mei 2005 berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPK RI Nomor 06/SK/I-VII.3/5/2005 yang diresmikan pada tanggal 27 Januari 2006. Perwakilan BPK RI di Bandung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V.Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPK No. 06/K/IXIII. 2/10/2008 Tentang Nama Kantor Perwakilan BPK RI maka nama kantor Perwakilan BPK RI di Bandung dirubah menjadi BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Adapun visi dan misi BPK RI Perwakilan Provinsi jawa barat adalah sebagai berikut :

1. Visi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

2. Misi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
b. Memberikan pendapat untuk meningktkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab Negara; dan
c. Berperan aktif dalam menentukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negra sesuai dengan SK BPK RI.

Adapun Nilai-nilai dasar BPK RI Perwakilan Provinsi jawa barat adalah sebagai berikut :

1. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4.1.2 Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kepala Perwakilan;
2. Kepala Sub Auditorat Jabar I,II,III;
3. Kepala seksi Jabar I.A, II.A, III.A;
4. Kepala seksi SDM;
5. Kepala seksi Jabar I.B, II.B, III.B;
6. Kepala subbag Keuangan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

4.1.3 Job Description

Untuk menjamin terselenggaranya tugas BPK RI sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, maka ditetapkan keputusan BPK RI No.39/SK/I-VIII.3/7/2007,13 juli 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI sebagai pengganti keputusan BPK RI No. 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir keputusan BPK RI No. 27/SK/I-VIII.3/5/2007.

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah pada daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kota/kabupaten di Provinsi Jawa barat serta BUMN dan lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut diatas, termaksud melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN serta BUMD dan lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari Sub Auditorat Jawa Barat I, Sub Auditorat Jawa Barat II, Sub Auditorat III dan secretariat perwakilan.

1. **Sub Auditorat Jawa Barat I membawahi :**
    a. Seksi Jawa Barat I.A, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
    b. Seksi Jawa Barat I.B, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah kabupaten bandung, kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
2. **Sub Auditorat Jawa Barat I membawahi :**
    a. Seksi Jawa Barat II.A, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

b. Seksi Jawa Barat II.B, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut.

3. Sub Auditorat Jawa Barat III membawahi :

a. Seksi Jawa Barat III.A, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, kabupaten Karawang, dan kabupaten Cianjur, serta BUMD dan lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut.

b. Seksi Jawa Barat III.B, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi,Kota Bogor, Kota Bekasi, dan kota Depok, serta BUMN dan lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut.

4.1.4 Aktivitas Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2009 dan 2010

Ada tiga jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK RI yaitu : PemeriksaanKeuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam pemeriksaan LKPD tahun 2009 dan 2010, selain member opini juga menemukan kelemahan sisitem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2008 pada 27 entitas dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan PDTT terhadap 7 BUMD, 8 Belanja Daerah dan Pemeriksaan tematik, yaitu 1 Infrastruktur, 2 Jamkesman, 1 PNPM, 1 wajar Dikdas dan pengelolaan sampah.

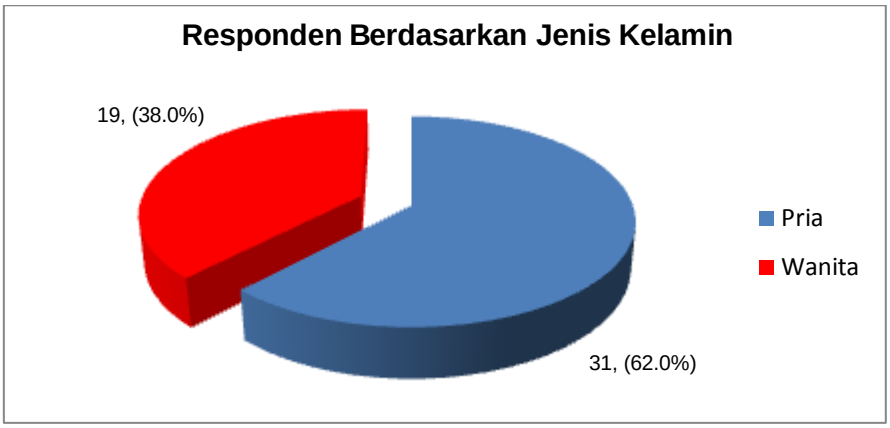
Pada Tahun 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemeriktah Daerah (LKPD) Tahun 2009, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan LKPD dilaksanakan di 27 entitas pada semester I, pada Semester II TA 2010, telah dilakukan pemeriksaan PDTT terhadap pendapatan daerah (2 Entitas), Belanja Daerah (8 Entitas), DAK (2 Entitas) yang merupakan pemeriksaan Tematik. Sedangkan Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 2 PDAM dan 1 Infrastruktur (Tematik).

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang dipilih dalam penelitian ini terdiri atas auditor Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas audit yaitu sebanyak 50 responden. Untuk variabel X_1, X_2, dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu auditor BPK RI Perwakulan Provinsi Jawa Barat.Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut:

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:

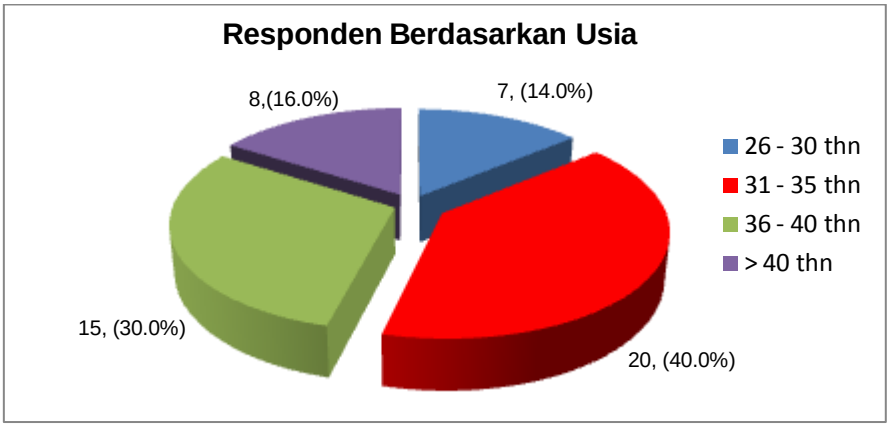


Gambar 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui profil auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 62% dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 38%, jadi responden paling banyak adalah pria. Alasannya adalah karena seorang pria lebih bisa diandalkan untuk bekerja kelapangan dibandingkan seorang wanita.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Profil responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini:

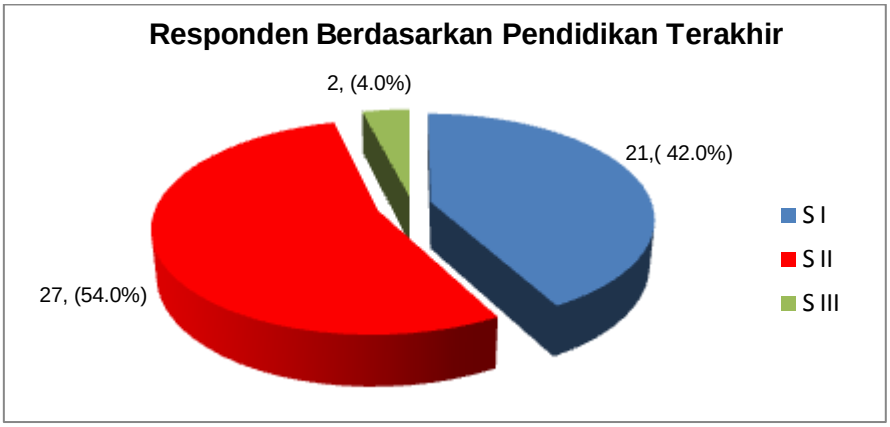


Gambar 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui usia auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden paling banyak yang berusia 31 sampai dengan 35 tahun yaitu sebesar 40% lalu yang berusia antara 36 sampai dengan 40 tahun yaitu sebesar 30% sedangkan sisanya berusia 30 tahun kurang dan 40 tahun lebih sebesar 30%. Alasan lebih banyak auditor yang berusia 31 sampai dengan 35 adalah karena umur tersebut lebih baik untuk beraktifitas lebih banyak dibanding umur 36 tahun sampai 40 dan juga jika dibandingkan dengan umur 30, umur 31 tahun sampai 35 lebih banyak pengalamannya dalam bekerja.

c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini:

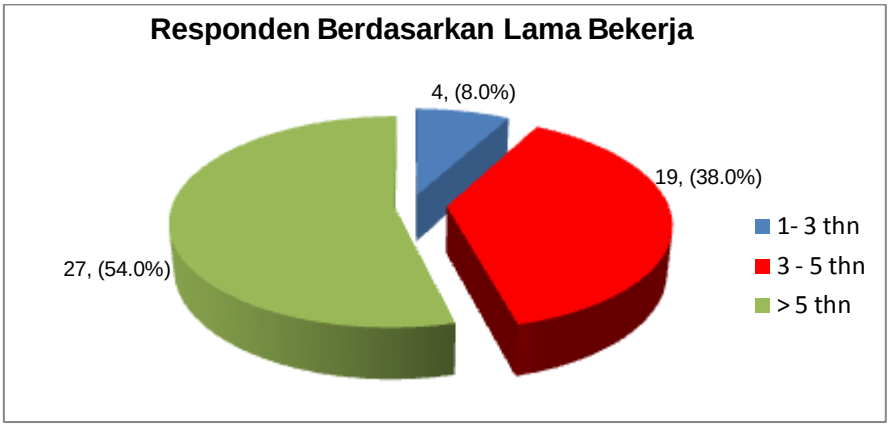


Gambar 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui pendidikan terakhir auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan terakhir S1 sebesar 42%, responden yang berpendidikan terakhir S2 sebesar 54% dan responden yang berpendidikan terakhir S3 hanya sebesar 4%. Jadi responden paling banyak adalah yang berpendidikan terakhir S2. Alasanya lebih banyak auditor yang memiliki pendidikan S2 adalah karena dibandingkan dengan S1 jelas lebih banyak pengetahuannya.

d. Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Profil responden berdasarkan lamanya bekerja dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini:



Gambar 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui lama bekerja auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang bekerja antara 1 sampai dengan 3 tahun sebesar 8%, yang bekerja antara 3 sampai dengan 5 tahun sebesar 38%, dan yang bekerja lebih dari 5 tahun sebesar 54%. Jadi responden paling banyak adalah yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Alasannya lebih banyak auditor yang bekerja lebih dari 5 tahun karena mereka lebih banyak pengalamannya dalam mengaudit dibandingkan bekerja antara 1 samapi 3 tahun dan anatar 3 sampai 5 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Analisis Kompetensi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui wawancara dan studi

pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 21 butir pernyataan dengan perincian 6 butir pernyataan mengenai kompetensi auditor, 6 butir pernyataan mengenai independensi auditor dan 9 butir pernyataan tentang kualitas audit BPK.

Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi sebagai alat bantu dalam pengambilan kesimpulan.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai pengaruh kompetensi auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kemampuan (*skill*)	307	500	61,4%	Cukup Baik
2	Pengalaman	317	500	63,4%	Cukup Baik
3	Pelatihan	149	250	59,6%	Cukup Baik
4	Pengetahuan	154	250	61,6%	Cukup Baik
	Total	**972**	**1500**	**61,8%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 61,8% maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat cukup baik. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai kompetensi auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan tiap indikator di atas :

a) Kemampuan (*skill*)

Indikator kemampuan (*skill*) menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kemampuan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Pendeteksian penyimpangan dalam audit	F	7	14	12	15	2	159	250	63,6%
		%	14,0	28,0	24,0	30,0	4,0			
2	Penyimpangan keuangan Negara dalam audit yang pernah terjadi	F	6	7	17	19	1	148	250	59,2%
		%	12,0	14,0	34,0	38,0	2,0			
	Total Indikator							**307**	**500**	**61,4%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.1 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator kemampuan sebesar 61,4% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya sebagian besar auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melakukan tugas audit. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendeteksian penyimpangan dalam audit

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 63,6%, dapat diketahui auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup sering melakukan penyimpangan keuangan negara.

2. Penyimpangan keuangan Negara dalam audit yang pernah terjadi

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 59,2%, dapat diketahui para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup banyak yang melakukan penyimpangan keuangan Negara.

b) Pengalaman

Indikator pengalaman diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengalaman

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Penugasan audit yang pernah ditangani	F	10	4	16	14	6	148	250	59,2%
		%	20,0	8,0	32,0	28,0	12,0			
4	Lama bekerja sebagai auditor BPK	F	7	12	24	7	0	169	250	67,6%
		%	14,0	24,0	48,0	14,0	0,0			
	Total Indikator							**317**	**500**	**63,4%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.2 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator pengalaman sebesar 63,4% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya sebagian besar auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat memiliki pengalaman yang cukup baik dalam melaksanakan tugas audit. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penugasan audit yang pernah ditangani

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 59,2%, menunjukkan bahwa penugasan yang pernah ditangani auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat sudah cukup banyak. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden telah pernah mendapatkan penugasan antara 8 – 12 kali.

2. Lama bekerja sebagai auditor BPK

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 67,6%, menunjukkan bahwa auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat pada umumnya sudah cukup lama bekerja sebagai auditor BPK. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden telah menjadi auditor BPK antara 2 – 3 tahun.

c) Pelatihan

Indikator pelatihan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelatihan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Pelatihan disiplin ilmu yang pernah diikuti	F	8	9	14	12	7	**149**	**250**	**59,6%**
		%	16,0	18,0	28,0	24,0	14,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.3 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator pelaihan sebesar 59,6% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya sebagian besar auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup banyak yang telah mengikuti pelatihan informal yang mendukung pelaksanaan tugas audit. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden telah pernah mengikuti pelatihan.

d) Pengetahuan

Indikator efisiensi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengetahuan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
6	Pengetahuan auditor dalam melakukan audit	F	9	8	16	12	5	**154**	**250**	**61,6%**
		%	18,0	16,0	32,0	24,0	10,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.4 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator pengetahuan sebesar 61,6% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya sebagian besar auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat telah memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam melakukan audit. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden cukup memahami peraturan, kode etik serta standar yang berlaku.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran mengenai kompetensi auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas keempat indikator yang membentuk variabel kompetensi auditor.

Tabel 4.6

Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kompetensi auditor

Variabel		**Skor Tanggapan Responden**					**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**% Skor Aktual**
		5	**4**	**3**	**2**	**1**			
Kompetensi auditor	F	47	54	99	79	21	**927**	**1500**	**61,8%**
	%	15,7	18,0	33,0	26,3	7,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Melalui tabel 4.5 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 61,8% termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya

kompetensi yang dimiliki auditor pada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat pada umumnya cukup tinggi.

4.3.2.2 Analisis Independensi Auditor Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 50 orang auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Untuk mendapatkan gambaran Independensi auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas 3 (tiga) indikator pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai pengaruh Independensi auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	*Gangguan Ekstern*	268	500	53,6%	Cukup Baik
2	*Gangguan Pribadi*	293	500	58,6%	Cukup Baik
3	*Pelatihan Organisasi*	312	500	62,4%	Cukup Baik
	Total	**873**	**1500**	**58,2%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 58,2% maka dapat disimpulkan bahwa independensi auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat cukup baik. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai independensi auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan tiap indikator di atas :

Independensi auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Independensi auditor diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai independensi auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator.

a) Gangguan Ekstern

Indikator gangguan ektern diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Gangguan Eksternal

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Fasilitas yang diberikan *auditee* jika sedang mengaudit	F	2	11	11	21	5	134	250	53,6%
		%	4,0	22,0	22,0	42,0	10,0			
2	Campur tangan pengaruh pihak lain yang pernah terjadi	F	0	12	15	18	5	134	250	53,6%
		%	0,0	24,0	30,0	36,0	10,0			
	Total Indikator							**268**	**500**	**53,6%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.6 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator gangguan eksternal sebesar 53,6% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat pada umumnya cukup sering mendapat gangguan dari pihak lain berkaitan dengan tugas audit

yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Fasilitas yang diberikan *auditee*

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 53,3%, menunjukkan bahwa para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup banyak yang ditawarkan fasilitas oleh auditee katika auditor sedang mengemban tugas audit. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden sebenarnya jarang mendapatkan tawaran fasilitas dari pihak yang sedang di audit.

2. Campur tangan pihak lain

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 53,3%, menunjukkan bahwa para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup banyak yang mendapati campur tangan pihak lain ketika sedang melaksanakan tugas audit. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden kadang-kadang mendapatkan campur tangan dari pihak lain ketika sedang melaksanakan tugas audit.

b) Gangguan Pribadi

Indikator Gangguan Pribadi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Gangguan Pribadi

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Penugasan yang ada keterkaitan keluarga dengan *Auditee*	F	5	10	13	14	8	140	250	56,0%
		%	10,0	20,0	26,0	28,0	16,0			
4	Penugasan yang anda tangani ada hubungannya dengan *auditee*	F	3	14	21	7	5	153	250	61,2%
		%	6,0	28,0	42,0	14,0	10,0			
	Total							**293**	**500**	**58,6%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.7 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator gangguan pribadi sebesar 58,6% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup sering menghadapi gangguan pribadi karena memiliki hubungan `kekerabatan dengan pihak yang diaudit. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penugasan yang ada keterkaitan keluarga dengan *Auditee*

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 58,6%, menunjukkan bahwa para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup banyak mendapat penugasan yang ada keterkaitan keluarga dengan *auditee*. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden tetap

melaksanakan audit meskipun pihak *auditee* masih memiliki keterkaitan keluarga dengan auditor.

2. Penugasan yang memiliki hubungan dengan *Auditee*

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 61,2%, menunjukkan bahwa para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup banyak yang mendapat penugasan yang ada hubungan dengan *auditee*. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden pernah mendapat penugasan yang ada hubungannya dengan *auditee*.

c) Gangguan Organisasi

Indikator gangguan organisasi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Gangguan Organisasi

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Hadiah yang biasa diberikan *auditee*	F	9	7	11	21	2	150	250	60,0%
		%	18,0	14,0	22,0	42,0	4,0			
6	Sering *auditee* memberikan hadiah	F	6	15	17	9	3	162	250	64,8%
		%	12,0	30,0	34,0	18,0	6,0			
	Total Indikator							**312**	**500**	**62,4%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.8 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator gangguan organisasi sebesar

62,4% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup sering mendapat campur tangan pihak lain. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Hadiah yang biasa diberikan *auditee*

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 60,0%, menunjukkan bahwa para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup banyak yang menerima hadiah pemberian dari auditee. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden biasa diberikan uang oleh auditee sebagai ucapan terimakasih.

2. Sering *auditee* memberikan hadiah

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 64,8%, menunjukkan bahwa para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup banyak yang diberkani hadiah oleh *auditee*. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden pernah diberikan hadiah oleh *auditee*.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran independensi auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator

yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas ketiga indikator yang membentuk variabel independensi auditor.

Tabel 4.9

Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Independensi auditor

Variabel		**Skor Tanggapan Responden**					**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**% Skor Aktual**
		5	**4**	**3**	**2**	**1**			
Independensi auditor	F	25	69	88	90	28	**873**	**1500**	**58,2%**
	%	8,3	23,0	29,3	30,0	9,3			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.9 dapat dilihat persentase skor akumulasi tanggapan responden dari ketiga indikator yang membentuk variabel independensi auditor sebesar 58,2% termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat pada umumnya sudah cukup independen dalam melaksanakan tugas audit.

4.3.3 Analisis Kualitas Audit Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.

Kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kualitas audit diukur menggunakan 6 (enam) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 9 butir pernyataan. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator.

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 50 orang auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Untuk mendapatkan gambaran Independensi auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas 3 (tiga) indikator pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai pengaruh kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	*Objektivitas*	144	250	57,6%	Cukup Baik
2	*Ketepatan waktu*	305	500	61,0%	Cukup Baik
3	*Kelengkapan*	280	500	56,0%	Cukup Baik
4	Akurat	136	250	54,4%	Cukup Baik
5	Meyakinkan	137	250	54,8%	Cukup Baik
6	Jelas	315	500	63,0%	Cukup Baik
	Total	**1317**	**2250**	**58,5%**	**Cukup Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 58,5% maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat cukup baik. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan tiap indikator di atas :

a) Objektivitas

Indikator objektivitas diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Objektivitas

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Sikap anda jika *auditee* memberikan hadiah	F	12	5	6	19	8	144	250	57,6%
		%	24,0	10,0	12,0	38,0	16,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.10 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator objektivitas sebesar 57,6% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya sebagian besar auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup objektif dalam mengeluarkan pendapat.

b) Ketepatan Waktu

Gambaran mengenai ketepatan waktu auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.11

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Ketepatan Waktu

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
2	Temuan auditor dalam memanipulasi data	F	13	4	8	17	8	147	250	58,8%
		%	26,0	8,0	16,0	34,0	16,0			
3	Penyelesaian pemeriksaan	F	8	9	18	13	2	158	250	63,2%

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
	laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	%	16,0	18,0	36,0	26,0	4,0			
	Total Indikator							**305**	**500**	**61,0%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.11 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator ketepatan waktu sebesar 61,0% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup tepat waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Temuan auditor dalam memanipulasi data

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 58,8%, menunjukkan bahwa para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup banyak yang melakukan manipulasi data. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden kadang-kadang menemukan manipulasi data.

2. Penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 63,2%, menunjukkan bahwa auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup cepat dalam menyelesaikan pemeriksanaan laporan keuangan. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan

skor 3, yang berarti paling banyak responden sudah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan selambat lambatnya 3 bulan.

c) Kelengkapan

Indikator efisiensi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kelengkapan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Sanksi yang biasa diberikan jika auditor melampaui batas waktu audit	F	3	10	13	20	4	138	250	55,2%
		%	6,0	20,0	26,0	40,0	8,0			
5	Laporan pemeriksaan dikatakan masuk akal	F	7	5	17	15	6	142	250	56,8%
		%	14,0	10,0	34,0	30,0	12,0			
	Total Indikator							**280**	**500**	**56,0%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.12 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator kelengkapan sebesar 56,0% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya kelengkapan hasil pemeriksaan auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup tinggi. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Sanksi yang diberikan jika auditor melampaui batas waktu audit

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 55,2%, menunjukkan bahwa para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup banyak yang mendapatkan sanksi jika melampaui batas waktu audit. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden hanya mendapatkan sanksi teguran jika melampaui batas waktu audit.

2. Laporan pemeriksaan yang masuk akal

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 56,8%, menunjukkan bahwa laporan pemeriksaan auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup masuk akal. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 3, yang berarti paling banyak responden sudah menyajikan laporan pemeriksaan yang cukup logis.

d) Akurat

Indikator akurat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Akurat

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
6	Laporan pemeriksaan yang dikatakan Akurat	F	4	8	11	24	3	136	250	54,4%
		%	8,0	16,0	22,0	48,0	6,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.13 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator keakuratan sebesar 54,4% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya laporan pemeriksaan auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup akurat. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden berpendapat laporan pemeriksaan dikatakan akurat jika temuannya masuk akal.

e) Meyakinkan

Indikator meyakinkan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Meyakinkan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	Hasil audit auditor yang dikatakan jelas	F	5	6	14	21	4	**137**	**250**	**54,8%**
		%	10,0	12,0	28,0	42,0	8,0			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.14 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas pernyataan yang membentuk indikator meyakinkan sebesar 54,8% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya laporan pemeriksaan auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup meyakinkan. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 2, yang berarti paling banyak responden

berpendapat hasil audit auditor dikatakan jelas jika mudah dibaca dan mudah dipahami.

f) Jelas

Indikator jelas diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kejelasan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
8	Laporan hasil audit dapat dibaca	F	4	19	10	13	4	156	250	62,4%
		%	8,0	38,0	20,0	26,0	8,0			
9	Hasil audit auditor yang dikatakan jelas	F	8	18	9	5	10	159	250	63,6%
		%	16,0	36,0	18,0	10,0	20,0			
	Total Indikator							**315**	**500**	**63,0%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.15 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk indikator kejelasan sebesar 63,0% dan termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya hasil pemeriksaan auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup jelas. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Laporan hasil audit dapat dibaca

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 62,4%, menunjukkan bahwa laporan hasil audit para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup mudah untuk dibaca. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat

dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 4, yang berarti paling banyak responden laporan hasil auditnya dengan jelas dapat dibaca.

2. Hasil audit auditor yang dikatakan jelas

   Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 63,6%, menunjukkan bahwa hasil audit para auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat cukup jelas. Dari distribusi skor tanggapan responden dapat dilihat paling banyak responden memilih jawaban dengan skor 4, yang berarti paling banyak responden berpendapat hasil audit dikatakan jelas jika bahasanya cukup singkat dan tidak berbelit-belit.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran kualitas audit yang dilakukan auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas keenam indikator yang membentuk variabel kualitas audit.

Tabel 4.16

Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kualitas audit

Variabel		**Skor Tanggapan Responden**					**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**% Skor Aktual**
		5	**4**	**3**	**2**	**1**			
Kualitas Audit	F	64	84	106	147	49	**1317**	**2250**	**58,5%**
	%	14,2	18,7	23,6	32,7	10,9			

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.16 dapat dilihat persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 58,5% termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya kualitas audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik.

4.4 Analisis Verifikatif

Setelah diuraikan gambaran data tanggapan responden, selanjutnya akan diuji pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit, baik secara simultan maupun secara parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi dan terakhir pengujian hipotesis. Semua tahapan tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS.15, dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

1) Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini hanya tiga asumsi yang disebutkan diatas diuji, karena data yang digunakan tidak mengandung unsur *timeseries* sehingga asumsi autokorelasi tidak diuji.

a. Hasil Pengujian Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi.

Tabel 4.17
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

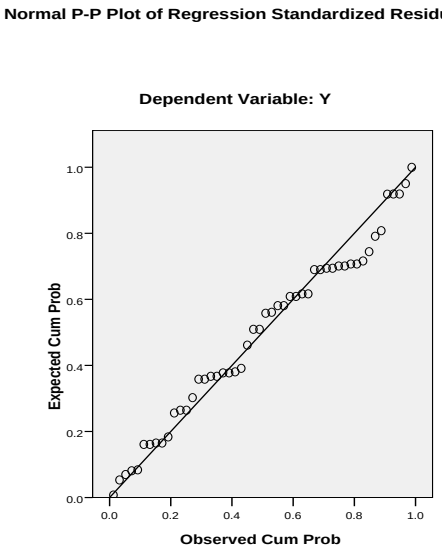
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters [a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34612640
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.120
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.847
Asymp. Sig. (2-tailed)		.470

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011)

Pada tabel 4.17 dapat dilihat nilai probabilitas (asymp.Sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,470. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut



Gambar 4.1

Grafik Normalitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

b. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.18

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.687	1.455
	X2	.687	1.455

a. Dependent Variable: Y

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011)

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.18 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

c. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari nilai residual(error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.19 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai **absolut dari residual(error).**

Tabel 4.19

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	-.164
		Sig. (2-tailed)	.255
		N	50
	X2	Correlation Coefficient	-.254
		Sig. (2-tailed)	.076
		N	50

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011)

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.19 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig) dari masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error (0,255 dan 0,076) masih lebih besar dari 0,05.

Setelah ketiga asumsi regressi diuji dan tidak terjadi pelanggaran, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, yaitu pengaruh kompetensi auditor dan independensi auditor terhadap kualitas audit.

2) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melakukan prediksi, perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun nilainya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu dua variabel independen yaitu audit kompetensi sebagai variabel X_1 dan

independensi auditor sebagai variabel X_2 dan satu variabel dependen yaitu kualitas audit.

Sehingga dapat diketahui dan dibuktikan sejauh mana hubungan kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Dalam perhitungannya penulis menggunakan dua cara yaitu manual dan komputerisasi. Cara perhitungan komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *SPSS 15 for windows.*

Model regressi digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada kualitas audit yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (kompetensi dan independensi auditor). Berdasarkan perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi dengan *SPSS 18 for windows* yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.20

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.267	.256		1.044	.302
	X1	.324	.096	.333	3.378	.001
	X2	.554	.092	.595	6.032	.000

a. Dependent Variable: Y

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011)

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 0{,}267 + 0{,}324\ X_1 + 0{,}554\ X_2}$$

Dimana :

Y = Kualitas audit

X_1 = Kompetensi auditor

X_2 = Independensi auditor

Pada persamaan regresi diatas, dapat dilihat koefisien regressi dari kedua variabel independen bertanda positif yang menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor yang tinggi akan meningkatkan kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nilai koefisien variabel kompetensi auditor (X_1) sebesar 0,324 menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi auditor sebesar 1 tingkat diprediksi akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,324 tingkat. Kemudian nilai koefisien independensi auditor (X_2) sebesar 0,554 menunjukkan bahwa peningkatan independensi auditor sebesar 1 tingkat diprediksi akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,554 tingkat.

4.4.1 Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (kompetensi auditor dan independensi auditor) dengan kualitas audit. Melalui korelasi parsial akan dicari besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kualitas audit ketika variabel independen lainnya konstan. Sebelum menghitung korelasi parsial, terlebih dahulu dihitung korelasi sederhana antar variabel dengan perhitungan sebagai beriut.

a) Korelasi kompetensi auditor dengan kualitas audit dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$rx_1y = \frac{n(\sum X_1 Y) - (\sum X_2 \sum Y)}{\sqrt{[n\sum {X_1}^2 - (\sum X_1)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dengan menggunakan rumus diatas diperoleh koefisien korelasi antara kompetensi auditor dengan kualitas audit sebagai berikut.

$$r_{X1Y} = \frac{639,441}{960,595}$$

$$r_{X1Y} = 0,666$$

b) Korelasi independensi auditor dengan kualitas audit dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$rx_2y = \frac{n(\sum X_2 Y) - (\sum X_2 \sum Y)}{\sqrt{[n\sum {X_2}^2 - (\sum X_2)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dengan menggunakan rumus diatas diperoleh koefisien korelasi antara independensi auditor dengan kualitas audit sebagai berikut.

$$r_{X2Y} = \frac{784,021}{1003,894}$$

$$r_{X2Y} = 0,781$$

c) Korelasi kompetensi auditor dengan independensi auditor dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$rx_1x_2 = \frac{n(\sum X_1 X_2) - (\sum X_1 \sum X_2)}{\sqrt{[n\sum {X_1}^2 - (\sum X_1)^2][n\sum {X_2}^2 - (\sum X_2)^2]}}$$

Dengan menggunakan rumus diatas diperoleh koefisien korelasi antara kompetensi auditor dengan independensi auditor sebagai berikut.

$$r_{X1X2} = \frac{576,823}{1031,204}$$

r_{X1X2} = 0,559

Hasil perhitungan tersebut juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi menggunakan *SPSS 15 for windows* sebagai berikut :

Tabel 4.22

Correlation kompetensi auditor, independensi auditor dan kualitas audit

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.666	.781
	X1	.666	1.000	.559
	X2	.781	.559	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000
	X1	.000	.	.000
	X2	.000	.000	.
N	Y	50	50	50
	X1	50	50	50
	X2	50	50	50

Setelah koefisien kolerasi antara b kompetensi auditor, independensi auditor dan kualitas audit telah diketahui, maka selanjutnya dapat menghitung korelasi parsial.

a. Korelasi Kompetensi Auditor Dengan Kualitas Audit Ketika Independensi Auditor Tidak Berubah

Korelasi kompetensi auditor dengan kualitas audit dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$rx_1y = \frac{rx_1y - rx_2y\, rx_1x_2}{\sqrt{[1 - rx_1\, y^2][1 - rx_1x_2{}^2]}}$$

$$r_{X_1.Y} = \frac{0,666 - (0,781 \times 0,559)}{\sqrt{\left[\left(1-(0,781)^2\right) \times \left(1-(0,559)^2\right)\right]}}$$

$$r_{X_1.Y} = \frac{0,228817}{0,517707}$$

$$r_{X_1.Y} = 0,442$$

Hasil perhitungan tersebut juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi menggunakan *SPSS 15 for windows* sebagai berikut.

Tabel 4.21

Koefisien Korelasi Parsial Kompetensi auditor Dengan Kualitas audit

Correlations

Control Variables			Y	X1
X2	Y	Correlation	1.000	.442
		Significance (2-tailed)	.	.001
		df	0	47
	X1	Correlation	.442	1.000
		Significance (2-tailed)	.001	.
		df	47	0

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011)

Hubungan antara kompetensi auditor dengan kualitas audit ketika independensi auditor tidak berubah adalah sebesar 0,442 dengan arah positif. Artinya hubungan kompetensi auditor dengan kualitas audit cukup kuat ketika independensi auditor tidak mengalami perubahan. Arah positif menggambarkan bahwa ketika kompetensi auditor meningkat, sementara independensi auditor tidak berubah maka kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat akan meningkat. Kemudian besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit ketika independensi auditor tetap dihitung menggunakan koefisien determinasi parsial dengan rumus sebagai berikut:

$Kd = (r_{X1.Y})^2 \times 100\%$

$Kd = (0,442)^2 \times 100\% = 19,5\%.$

b. Korelasi Independensi Auditor Dengan Kualitas Audit Ketika Kompetensi Auditor Tidak Berubah

c. Koefisien korelasi antara independensi auditor dengan kualitas audit ketika kompetensi auditor tidak berubah dihitung menggunakan rumus berikut:

$$rx_2y = \frac{rx_2y - rx_1y \; rx_1x_2}{\sqrt{[1 - rx_1y^2][1 - rx_1x_2{}^2]}}$$

$$r_{X_2.Y} = \frac{0,781 - (0,666 \times 0,559)}{\sqrt{\left[\left(1-(0,666)^2\right) \times \left(1-(0,559)^2\right)\right]}}$$

$$r_{X_2.Y} = \frac{0,408624}{0,618577}$$

$$r_{X_2.Y} = 0,661$$

Hasil perhitungan tersebut juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi menggunakan *SPSS 15 for windows* sebagai berikut.

Tabel 4.22

Koefisien Korelasi Parsial Independensi auditor Dengan Kualitas audit

Correlations

Control Variables			Y	X2
X1	Y	Correlation	1.000	.661
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	47
	X2	Correlation	.661	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	47	0

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011)

Hubungan antara independensi auditor dengan kualitas audit ketika kompetensi auditor tidak berubah adalah sebesar 0,661 dengan arah positif. Artinya hubungan independensi auditor dengan kualitas audit termasuk kuat/erat

ketika kompetensi auditor tidak mengalami perubahan. Arah positif menggambarkan bahwa ketika independensi auditor semakin tinggi, sementara kompetensi auditor tidak berubah maka kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat akan meningkat. Kemudian besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit ketika kompetensi auditor tetap dihitung menggunakan koefisien determinasi parsial dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = (r_{X2.Y})^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0{,}661)^2 \times 100\% = 43{,}7\%.$$

4.4.2 Korelasi Berganda Kompetensi (X_1) dan Independensi auditor (X_2) Terhadap Kualitas audit (Y) Secara Parsial Maupun Simultan

Korelasi berganda adalah nilai yang menunjukan kekuatan hubungan antar kedua variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat. Koefisien korelasi berganda antara kompetensi dan independensi auditor dengan kualitas audit dihitung menggunakan rumus berikut :

$$r_{12}y = \sqrt{\frac{ry_1{}^2 + ry_2{}^2 - 2ry_1.ry_2.r_{12}}{(1 - r_{12}{}^2)}}$$

$$r_{12.Y} = \sqrt{\frac{(0{,}666)^2 + (0{,}781)^2 - 2(0{,}666 \times 0{,}781 \times 0{,}559)}{\left(1 - (\times 0{,}559)^2\right)}}$$

$$r_{12.Y} = \sqrt{\frac{1,0530 - 0,5816}{\left(1 - \left(0,559\right)^2\right)}}$$

$$r_{12.Y} = \sqrt{\frac{0,4714}{0,6871}} = \sqrt{0,686} = 0,828$$

Hasil perhitungan tersebut juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi menggunakan *SPSS 15 for windows* sebagai berikut.

Tabel 4.23

Analisis Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828[a]	.686	.673	.35341

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011)

Berdasarkan data pada tabel 4.23 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi ganda adalah sebesar 0,828 (R) yang berada antara 0,80 - 1,00, artinya kompetensi dan independensi auditor secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.

4.4.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kompetensi dan independensi auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi berganda dapat dihitung melalui korelasi berganda yang telah dihitung sebelumnya dengan rumus sebagai berikut:

$Kd = (r_{12.Y})^2 \times 100\%$

$Kd = (0{,}828)^2 \times 100\% = 68{,}6\%.$

Nilai tersebut sama dengan nilai yang terdapat pada tabel 4.23, tepatnya dilihat dari nilai R Square yaitu sebesar 0,686 atau 68,6%, artinya secara bersama-sama kompetensi dan independensi auditor memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 68,6% terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar variabel kompetensi dan independensi auditor.

4.4.5 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Selanjutnya untuk menguji apakah kompetensi dan independensi auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit, maka dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat melalui tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS.15. Tahapan-tahapan pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$: Menunjukan bahwa kompetensi auditor dan independensi auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat bebas (k; n-k-1) df= 2:47. Pada tabel F untuk df_1= 2, df_2=47 diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,195.

c. Mencari nilai F_{hitung}

Nilai F untuk pengujian secara simultan pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit dihitung menggunakan rumus berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

$$F = \frac{0,686 / 2}{0,314 / 47} = 51,371$$

Hasil perhitungan tersebut juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi menggunakan *SPSS 15 for windows* sebagai berikut :

Tabel 4.24
Anova Untuk Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.833	2	6.416	51.371	.000[a]
	Residual	5.870	47	.125		
	Total	18.703	49			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 51,371.

d. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} terhadap F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

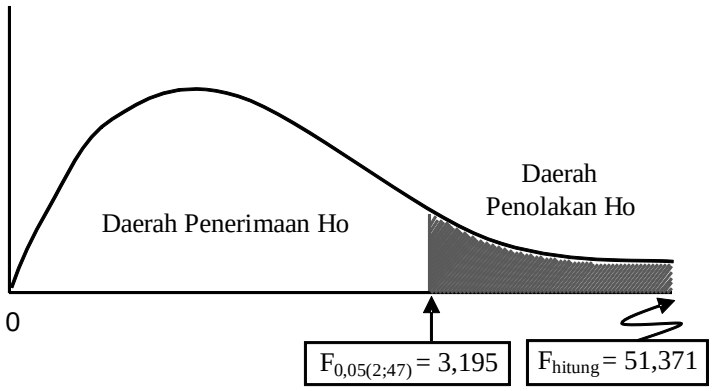
Jika $F_{hitung} < F_{tabel,}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} terhadap F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (51,371 > 3,195), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan menolak Ho dan menerima Ha yang berarti kedua variabel bebas, yaitu kompetensi auditor dan independensi auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Provinsi Jawa Barat. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat nilai signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.24.

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel kompetensi auditor dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.5

Daerah Penolakan H_0 Pada Pengujian Secara Bersama-sama

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 51,371 berada pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa kompetensi dan independensi auditor secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

4.4.4.1 Pengaruh Kompetensi Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Secara Parsial.

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,012 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0.05 dan derajat bebas 47 untuk pengujian dua pihak. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.25

Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.267	.256		1.044	.302
	X1	.324	.096	.333	3.378	.001
	X2	.554	.092	.595	6.032	.000

a. Dependent Variable: Y

(Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2011)

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.25 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

1) Pengaruh Kompetensi Auditor Secara Parsial Terhadap Kualitas Audit.

Dihipotesiskan bahwa kompetensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, untuk membuktikan dugaan tersebut dilakukan pengujian secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistic

   $H_0 : \beta_1 = 0$: Menunjukan bahwa kompetensi auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.

   $H_a : \beta_1 \neq 0$: Menunjukan bahwa kompetensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.

b. Menentukan tingkat signifikansi

   Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat bebas (df= n-k-1) df= 50-2-1= 47, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,012.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Nilai t untuk pengujian secara parsial pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dihitung menggunakan rumus berikut :

$$t_1 = t1y\sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r1y^2)}}$$

$$t_1 = 0,442\sqrt{\frac{50-2-1}{\left(1-(0,442)^2\right)}} = 3,378$$

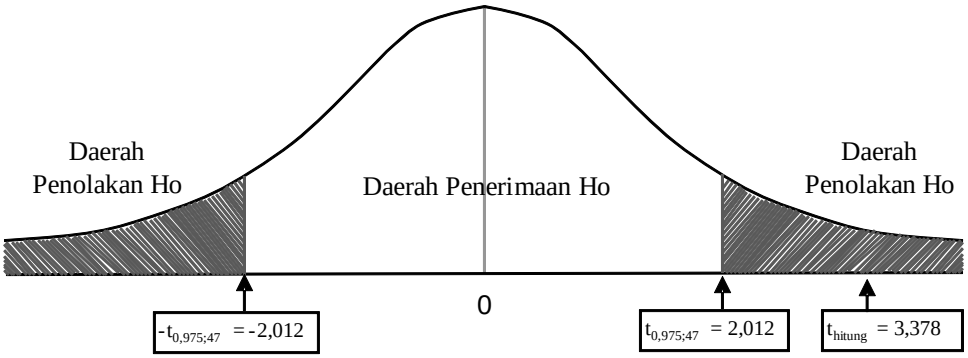
Melalui keluaran software SPSS.15 seperti terlihat pada tabel 4.25 diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel kompetensi auditor sebesar 3,378

d. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} terhadap t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,378 > 2,012), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Artinya kompetensi auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.6

Grafik Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Kompetensi auditor Terhadap Kualitas audit

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 3,378 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa kompetensi auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.

2) Pengaruh Independensi Auditor Secara Parsial Terhadap Kualitas Audit

Dihipotesiskan bahwa independensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, untuk membuktikan dugaan tersebut dilakukan pengujian secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

Hipotesis kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$: Menunjukkan bahwa independensi auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Menunjukkan bahwa independensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat bebas (df= n-k-1) df= 50-2-1= 47, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,012.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Nilai t untuk pengujian secara parsial pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit dihitung menggunakan rumus berikut :

$$t2 = t_2 y \sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r_2 y^2)}}$$

$$t_2 = 0,661 \sqrt{\frac{50-2-1}{\left(1-(0,661)^2\right)}} = 6,032$$

Melalui keluaran software SPSS.15 seperti terlihat pada tabel 4.25 diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel kompetensi auditor sebesar 3,378

Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.25 diperoleh nilai t_{hitung} variabel independensi auditor sebesar 6,032.

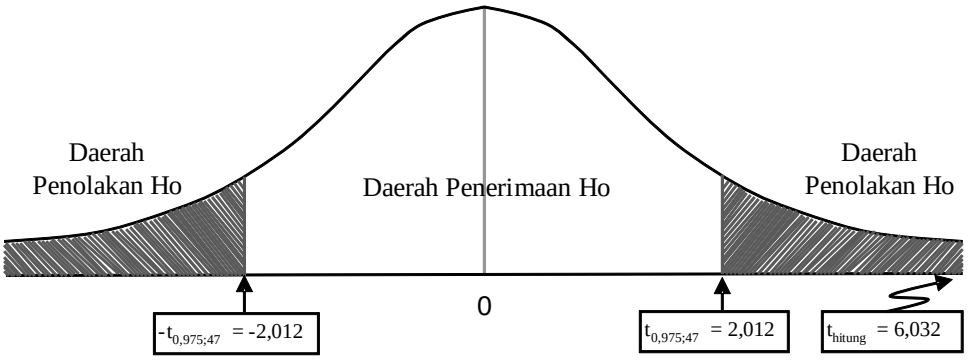
d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} terhadap t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} terhadap t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,032 > 2,012), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk

menolak Ho sehingga Ha diterima. Artinya independensi auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.4

Grafik Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Independensi auditor Terhadap Kualitas audit

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 6,032 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa independensi auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat.